

**LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG
PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 30 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



Drh. Rachmi Setyorini, MKM

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	34
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	43
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	49
F. Pengungkapan Penting Lainnya	59
VI. Lampiran dan Daftar	61

**SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL,
SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK**
JL. PERCETAKAN NEGARA NO. 23, JAKARTA PUSAT 10560
TELEPON 021 4244819, 4207683, 4244691 FAXIMILE 021 4244819

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2022 telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 30 Juni 2022

Kuasa Pengguna Anggaran,



Dri. Rachmi Setyorini, MKM

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Semester I Tahun Anggaran 2022 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) beserta perubahannya dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2022. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp53.374.300.000,00 atau mencapai 54.49 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp97.960.620.000,00. Realisasi Belanja Negara pada Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp20.582.049.342,00 atau mencapai 41.16 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 50.004.587.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2022. Nilai Aset per 30 Juni 2022 dicatat dan disajikan sebesar Rp7.779.111.551,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp1.358.389.521,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp6.029.966.155,00, dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp390.755.875,00, Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.315.637.698,00 dan Rp5.463.473.853,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp60.793.937.500,00.

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp21.172.393.101,00 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp39.621.544.399,00. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,00 dan sebesar Rp39.621.544.399,00. sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp39.621.544.399,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 adalah sebesar Rp6.098.817.612,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp39.621.544.399,00 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp7.464.637.500,00) dan Transaksi Antar Entitas sebesar (Rp32.792.250.658,00) serta penurunan ekuitas sebesar (Rp635.343.759,00) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2022 adalah senilai Rp5.463.473.853,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2022 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2022 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**Tabel 1. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2022		% thd Angg	TA 2021
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	97.960.620.000	53.374.300.000	54,49	4.620.280
JUMLAH PENDAPATAN		97.960.620.000	53.374.300.000	54,49	4.620.280
BELANJA	B.2.				
Belanja Barang	B.3	47.791.169.000	18.857.892.341	39,46	14.017.173.826
Belanja Modal	B.4	2.213.418.000	1.724.157.001	77,90	412.665.500
JUMLAH BELANJA		50.004.587.000	20.582.049.342	41,16	14.429.839.326

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**Tabel 2. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
NERACA
PER 30 JUNI 2022 DAN 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-22	31-Dec-21
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.288.146.422	
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	70.243.099	
Persediaan	C.3	-	10.025.000
Jumlah Aset Lancar		1.358.389.521	10.025.000
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.4	15.471.772.199	14.907.256.361
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.5	-	32.450.000
Aset Tetap Lainnya	C.6	424.498.150	425.198.150
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.7	(9.866.304.194)	(9.660.563.440)
Jumlah Aset Tetap		6.029.966.155	5.704.341.071
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.8	1.784.004.000	2.065.638.500
Aset Lain-Lain	C.9	1.044.276.163	
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.10	(2.437.524.288)	(1.681.186.959)
Jumlah Aset Lainnya		390.755.875	384.451.541
JUMLAH ASET		7.779.111.551	6.098.817.612
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga I	C.11	977.540.276	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.12	49.951.000	-
Uang Muka dari KPPN	C.13	1.288.146.422	-
Jumlah Kewajiban		2.315.637.698	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.14	5.463.473.853	6.098.817.612
JUMLAH EKUITAS		5.463.473.853	6.098.817.612
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.779.111.551	6.098.817.612

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**Tabel 3. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	60.793.937.500	-
JUMLAH PENDAPATAN		60.793.937.500	-
BEBAN			
Beban Persediaan	D.2	10.025.000	139.974.459
Beban Barang dan Jasa	D.3	8.435.334.500	5.365.042.628
Beban Pemeliharaan	D.4	8.051.800	7.660.800
Beban Perjalanan Dinas	D.5	11.371.754.218	8.494.762.648
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.6	1.347.227.583	875.052.538
JUMLAH BEBAN		21.172.393.101	14.882.493.073
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		39.621.544.399	(14.882.493.073)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.7		
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	4.620.280
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(Defisit) dari kegiatan non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	4.620.280
SURPLUS/(DEFISIT) - LO		39.621.544.399	(14.877.872.793)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**Tabel 4. SATUAN KERJA DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA
30 JUNI 2022 DAN 30 JUNI 2021**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30 Juni 2022	30 Juni 2021
EKUITAS AWAL	E.1	6.098.817.612	4.548.131.244
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	39.621.544.399	(14.877.872.793)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN	E.3	(7.464.637.500)	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2		-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3		-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4		-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	(45.000.000)	-
LAIN-LAIN	E.3.6	(7.419.637.500)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	(32.792.250.658)	14.470.753.274
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(635.343.759)	(407.119.519)
EKUITAS AKHIR	E.6	5.463.473.853	4.141.011.725

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dasar
Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengawasi peredaran obat tradisional, produk komplemen dan kosmetika. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Entitas berkedudukan di Jalan Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat, 10560.

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen. Melalui peran tersebut diharapkan masyarakat dapat terlindungi dari produk obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan yang beresiko terhadap kesehatan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen berkomitmen dengan visi “*Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.*” Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat
- Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

- Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

A.1.1 Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Dalam menjalankan tugasnya Deputy II menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

- Penyusunan kebijakan di bidang Pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi dan pengawasan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM.

Dalam menunjang pencapaian visi, misi dan pelaksanaan sistem pengawasan di Badan POM serta mewujudkan good governance, Deputy II mempunyai tugas melakukan pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik, melalui:

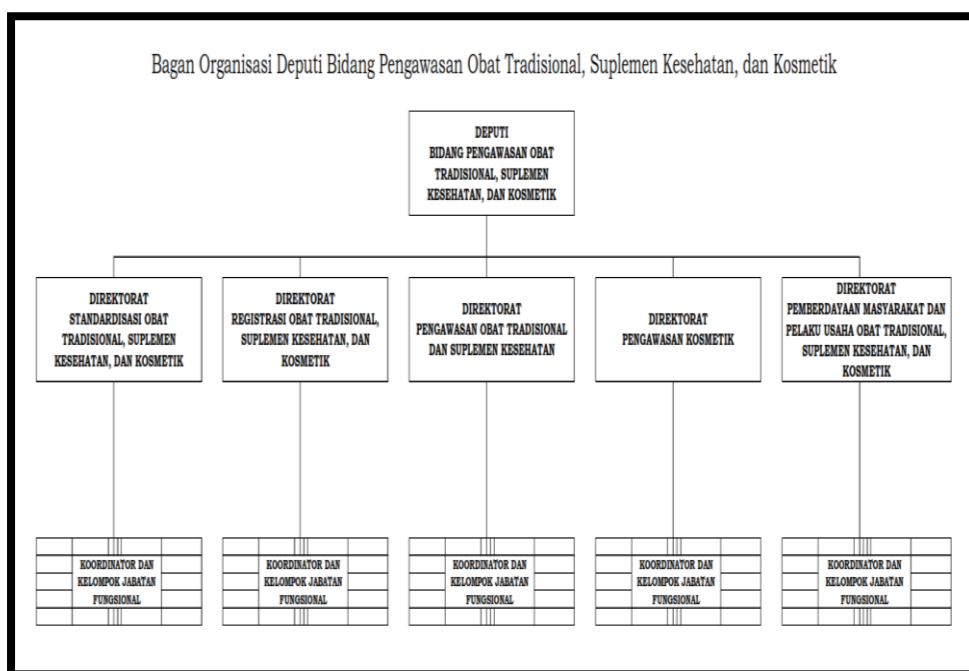
- Perkuatan kebijakan dan regulasi di bidang obat tradisional, suplemen
- kesehatan dan kosmetik;
- Peningkatan pelayanan publik meliputi penilaian (pre-market evaluation)
- untuk produk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik sebelum beredar;
- Perkuatan pengawasan post-market produk beredar untuk obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik.
- Peningkatan dan perkuatan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat serta mendorong kemandirian pelaku usaha.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Deputy II didukung oleh 5 (lima) Direktorat sebagai unit kerja teknis yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, unit-unit tersebut yaitu:

- Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
- Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

- Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan
- Direktorat Pengawasan Kosmetik
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

A.1.4 Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan beserta perubahannya. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.05/2022 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Dasar **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplemen. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Penyusunan dan penyajian

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapat **(1) Pendapatan- LRA**
an-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapat **(2) Pendapatan- LO**
an-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan pendapatan-LO, pada Badan POM adalah sebagai berikut:

- a. Pengakuan pendapatan berdasarkan kas yang diterima adalah pendapatan diakui pada saat penerimaan kas, yang berlaku pada layanan jasa penerbitan Surat Keterangan Impor (SKI) dan Surat Keterangan Ekspor (SKE), penjualan baku pembanding dan hewan percobaan.
- b. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- c. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 207/PMK.06/2019 Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.06/2014 Tentang Penentuan Kualitas Piutang Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Pada Kementerian Negara/Lembaga Dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang sebagai berikut:

Tabel 5. Kriteria kualitas piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Pada tahun 2021, Sesuai PMK Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, Pencatatan Persediaan menggunakan metode pencatatan Perpetual dan dinilai dengan menggunakan Metode *First In First Out* (FIFO). Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan

masing-masing. Dalam hal metode FIFO belum dapat diterapkan, maka penilaian Persediaan dilakukan dengan metode perhitungan berdasarkan harga perolehan terakhir.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik (*stock opname*), yaitu dengan cara memperhitungkan saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan, yang hasilnya dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan.

*Aset
Tetap*

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan /irigasi /jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama

Masa Manfaat.

- Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak

terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 81/KM.6/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban (6) **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka

panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

Alokasi dan Realisasi Anggaran serta Capaian Output

A.6 Capaian Output Strategis

Selama periode Tahun Anggaran 2021, output strategis yang telah dicapai oleh satker Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut :

Table 8. Capaian Output

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Semester I Tahun Anggaran 2022

No	Kode Output Strategis	Uraian Output	Alokasi Anggaran	Realisasi Belanja	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Satuan	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	4119.BAH,001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	4.195.613.000	1.497.943.711	35,7	8566	Keputusan	4753	53,37
2	4119.BIA,001	Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	7.078.498.000	3.569.741.897	50,43	2307	Keputusan	1485	58,48
3	4121.BIA,001	Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	5.630.228.000	1.827.052.074	32,45	1386	Keputusan	636	50,85
4	4121.BAH,001	Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	3.657.722.000	1.008.979.761	27,58	11980	Keputusan	6295	51,01
5	4128.PCA,001	Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	10.400.772.000	4.204.066.717	40,42	56254	Keputusan	51781	72,49
6	4129.CAN,001	Perangkat pengolah data dan komunikasi	1.426.956.000	1.426.955.050	100	100	Unit	100	100
7	4129.ABG,001	Kajian Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Diselesaikan	450.000.000	154.975.000	34,44	130	Rekomendasi Kebijakan	36	50,74
8	4129.CAB,001	Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	150.594.000	99.586.951	66,13	5	Unit	3	60
9	4129.AFA,001	Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	4.770.632.000	1.695.522.992	35,54	9	Standar	0	67
10	6385.BDC,001	Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK, dan Kos	5.543.572.000	2.205.089.127	39,78	274	kegiatan	106	51,73
11	6385.BDC,002	Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OT, SK dan Kos yang sesuai standar	6.700.000.000	2.960.330.482	44,18	163	kegiatan	81,72	55,49

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode Semester I Tahun Anggaran 2022. Satker Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 5 (lima) kali dari DIPA awal. Rincian Revisi DIPA untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 9. Rincian Revisi DIPA

No	Revisi DIPA			
	Tanggal	Revisi Ke-	Anggaran	Keterangan
1	16 Desember 2021	1	50.004.587.000	meliputi penambahan belanja barang operasional, pengurangan pada anggaran belanja barang non operasional, pengurangan pada anggaran belanja barang persediaan, pengurangan pada anggaran belanja jasa dan anggaran belanja pemeliharaan, penambahan pada anggaran perjalanan dalam negeri, dan pengurangan pada anggaran belanja perjalanan luar negeri. Terkait Belanja Modal meliputi pengurangan pada belanja modal peralatan dan mesin dan penambahan pada belanja modal lainnya.
2	7 April 2022	2	50.004.587.000	
3	14 April 2022	3	50.004.587.000	
4	9 Juni 2022	4	50.004.587.000	
5	11 Mei 2022	5	50.004.587.000	

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	30-Jun-22	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	97.960.620.000	97.960.620.000
Jumlah Pendapatan	97.960.620.000	97.960.620.000
Belanja		
Belanja barang	47.791.169.000	47.791.169.000
Belanja Modal	2.213.418.000	2.213.418.000
Jumlah Belanja	50.004.587.000	50.004.587.000

Sedangkan apabila dilihat berdasarkan Anggaran dan Program maka perubahannya adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Rincian Realisasi Pendapatan berdasarkan Anggaran dan Program

Kode	Program	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Belanja Pegawai (51)	063.01.DR Pengawasan Obat dan Makanan	0,00	0,00
Belanja Barang (52)		47.791.169.000,00	47.791.169.000,00
Belanja Modal (53)		2.213.418.000,00	2.213.418.000,00
Total		50.004.587.000,00	50.004.587.000,00

Realisasi
Pendapatan
Rp53.374
.300.000,
00

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan Semester I Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp53.374.300.000,00 dan Rp4.620.280,00. Realisasi pendapatan 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 100% dibandingkan tahun anggaran 2021. tingginya realisasi pendapatan dikarenakan pada tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan PNPB Fungsional dicatat oleh Satker Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik terdiri hanyalah pendapatan yang berasal dari Pendapatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	Semester I TA 2022		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Negara dan Hibah	-	-	-
1. Penerimaan Dalam Negeri	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	97.960.620.000	53.374.300.000	54,49
Jumlah	97.960.620.000	53.374.300.000	54,49

Realisasi Pendapatan Semester I Tahun Anggaran 2022 berupa pendapatan fungsional yang terdiri dari Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut

Tabel 14. Rincian Pendapatan Fungsional

No	Akun	Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	425321	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	97.960.620.000	53.374.300.000	54.49

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Hal ini disebabkan pada tahun Anggaran 2022 realisasi pendapatan PNBPN Fungsional dicatat oleh Satker Kantor Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang berasal dari Pendapatan Fungsional Rincian Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut.

Tabel 15. Perbandingan Realisasi Pendapatan
30 Juni 2022 dan 2020

URAIAN	REALISASI TA. 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	53.374.300.000	4.620.280	0,01
Jumlah	53.374.300.000	4.620.280	50,09

Realisasi **B.2 Belanja**

Belanja

Negara

Rp20.582.0

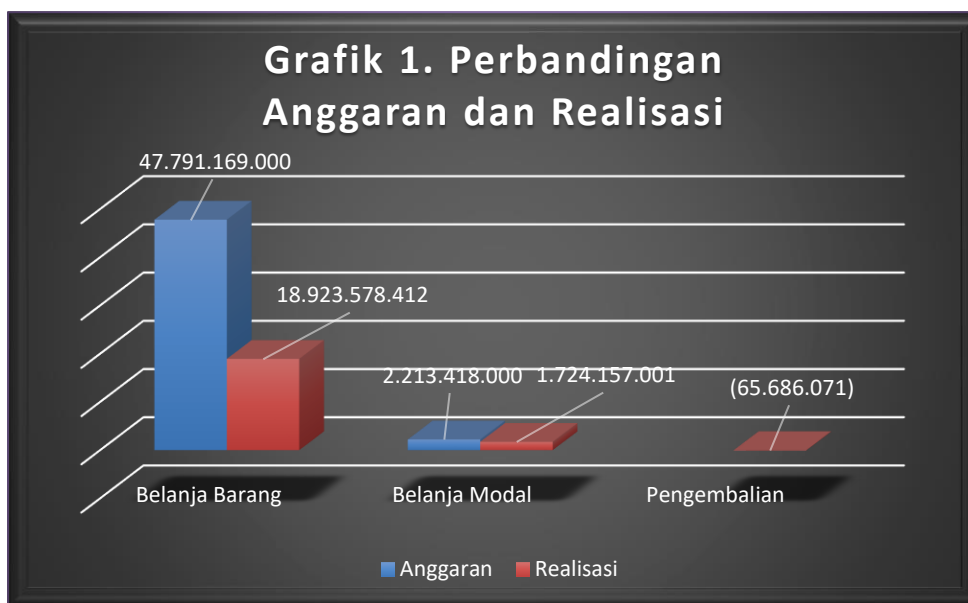
49.342,00

Realisasi Belanja instansi Semester I Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp20.582.049.342,00 atau 41.16% dari anggaran belanja sebesar Rp50,004.587.000,00. Rincian Realisasi Belanja untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
30 Juni 2022

Uraian	30-Jun-22		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang	47.791.169.000	18.923.578.412	39,60
Belanja Modal	2.213.418.000	1.724.157.001	77,90
Total Belanja Kotor	50.004.587.000	20.647.735.413	41,29
Pengembalian		(65.686.071)	-
Jumlah	50.004.587.000	20.582.049.342	41,16

Grafik 1. Perbandingan Anggaran dan Realisasi



Dibandingkan Tahun Anggaran 2021. Realisasi Belanja Semester I Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan sebesar 42.64%. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja barang sebesar 34.53 dan kenaikan yang signifikan pada belanja modal yaitu sebesar 317.81%.

Tabel 17. Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2022 dan 2020

URAIAN	TA 2022	TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang	18.857.892.341	14.017.173.826	34,53
Belanja Modal	1.724.157.001	412.665.500	317,81
Jumlah	20.582.049.342	14.429.839.326	42,64

Belanja
Barang
Rp18.857.

B.2.1 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Semester I Tahun Anggaran 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar

892.341,0
0

Rp18.857.892.341,00 dan Rp14.429.839.326,00. Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 34.53 persen dari Realisasi Belanja Barang pada 2021. Rincian Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut

*Tabel 18. Perbandingan Belanja Barang
30 Juni 2022 dan 2020*

URAIAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.385.823.132	621.638.295	122,93
Belanja Barang Non Operasional	2.498.313.251	1.557.901.494	60,36
Belanja Barang Konsumsi	0	149.707.750	(100,00)
Belanja Sewa	294.800.866	0	100
Belanja Jasa	3.803.972.035	3.185.502.839	100
Belanja Pemeliharaan	7.651.800	7.660.800	(0,12)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	10.709.016.768	8.582.054.552	24,78
Belanja Perjalanan Luar Negeri	224.000.560	0	100,00
Jumlah Belanja Kotor	18.923.578.412	14.104.465.730	34,17
Pengembalian Belanja	(65.686.071)	(87.291.904)	(24,75)
Jumlah Belanja	18.857.892.341	14.017.173.826	34,53

Terdapat pengembalian belanja berupa :

URAIAN	30 Juni 2022
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	43.972.671
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.713.400
Jumlah	65.686.071

B.2.1.1 Belanja Barang Penanganan Pandemi COVID-19

Satker Deputy II Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengalokasikan belanja barang sebesar Rp1.165.285.000,00. Anggaran tersebut

terrealisasi sebesar Rp550.938.643,00 atau 47.28%. Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid 19 untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut

Tabel 19. Belanja Barang untuk Penanganan Pandemi COVID-19

Akun	Uraian Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-	991.984.000	455.831.154	46%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid - 19	900.000	0	
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	172.401.000	95.107.489	55%
	Pengembalian		0	
Total		1.165.285.000	550.938.643	47%

Tabel 21. Rincian Realisasi Belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Periode 30 Juni 2022

Kode Output	Kode Komponen	Kode Sub Komponen	Akun	Pagu	Realisasi	Penyerapan (%)
4119.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk OT dan SK	053 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	521131	120.000.000	84.825.954	71%
4119.BIA,001 Pengawasan dan Pengendalian Produk	053 Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	D Penanganan Pandemi COVID-19 di Direktorat Pengawasan OT dan SK	521131	10.000.000	3.911.000	39%
4121.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	A Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	521131	13.965.000	13.802.297	99%
4121.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	F Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	521131	10.680.000	4.400.000	41%
4121.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	D Evaluasi Pelayanan Publik Pengawasan Keamanan dan Mutu Kosmetik	521131	26.600.000	20.625.204	78%

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Semester I Tahun Anggaran 2022

4121.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan kosmetik	A Pemenuhan Keperluan Perkantoran	521131	98.080.000	32.495.683	33%
4121.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan kosmetik	J Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19	521131	38.000.000	14.822.506	39%
4121.BIA,001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	A Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	521131	20.838.000	12.318.215	59%
4121.BIA,001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	B Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	521131	44.382.000	28.942.268	65%
4121.BIA,001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik	A Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memiliki Ijin Edar	521131	1.690.000	400.000	24%
4128.PCA,001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	051 Registrasi Obat Tradisional	F Coaching Clinic Sistem dan Tata Cara Registrasi Produk dan Iklan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	521131	5.000.000	-	0%
4128.PCA,001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	056 Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	F Pemenuhan Keperluan perkantoran	521131	2.400.000	660.000	28%
4128.PCA,001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	056 Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	I Pelaksanaan Kegiatan Perkantoran di Masa Pandemic Covid 19	521131	155.880.000	95.084.618	61%
4128.PCA,001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	056 Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	J Percepatan Penanganan Covid-19	521131	126.300.000	75.477.778	60%
4129.AFA,001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 Monitoring dan evaluasi kinerja standarisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	A Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	521131	103.000.000	85.200.000	83%
4129.AFA,001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 Monitoring dan evaluasi kinerja standarisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	B Penanganan Pandemi Covid-19	521131	25.000.000	23.101.250	92%
6385.BDG,001 UMKM Kosmetik yang sesuai standar	051 Pendampingan UMKM Kosmetik	A Forum Kerja Pengembangan Hilirisasi dan Expo Kosmetik Tematik Nasional	521131	1.111.000	802.000	72%
6385.BDG,001 UMKM Kosmetik yang sesuai standar	051 Pendampingan UMKM Kosmetik	C Integrasi Lintas Sektor Dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kosmetik	521131	1.111.000	1.110.000	100%

Laporan Keuangan Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Semester I Tahun Anggaran 2022

6385.QDG,001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	A Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	521131	88.200.000	52.595.222	60%
6385.QDG,001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	C Pemberdayaan Orang Tua Angkat Dalam Rangka Peningkatan UMKM Obat Tradisional Berdaya Saing	521131	1.000.000	-	0%
6385.QDG,001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	D Optimalisasi Pelaksanaan Pendampingan UMKM OT	521131	900.000	900.000	100%
6385.QDG,001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	E Pendampingan Dalam Rangka Pemberdayaan UMKM serta Usaha Jamu Gendong	521131	933.000	-	0%
6385.QDG,001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	S Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	521131	12.000.000	2.891.622	24%
Total 521131				991.984.000	455.831.154	61%
4119.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	051 Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	B Pembekalan bagi Industri di Bidang OT dalam rangka Percepatan Penerapan	522192	3.000.000	-	0%
4119.BAH,001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	051 Pelaksanaan Sertifikasi Sarana OT dan SK	C Desk CAPA sertifikasi/ inspeksi CPOTB dan layanan denah on site	522192	3.000.000	-	0%
4119.BIA,001 Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	D Penanganan Pandemi COVID-19 di Direktorat Pengawasan OT dan SK	522192	24.750.000	17.745.750	72%
4119.BIA,001 Keputusan Hasil Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Peningkatan Koordinasi dalam tindak lanjut pengawasan OT dan SK	H Pengawasan Keamanan dan Mutu OT dan SK	522192	6.750.000	-	0%
4121.BAH. 001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	D Percepatan Pelayanan Publik dalam upaya Peningkatan Daya Saing melalui Peningkatan Pengetahuan Petugas dan Pelaku Usaha	522192	43.200.000	34.500.000	80%
4121.BAH. 001 Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 Monitoring dan evaluasi kinerja pengawasan kosmetik	J Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19	522192	18.000.000	9.551.500	53%
4121.BIA. 001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi	B Intensifikasi Pengawasan Promosi Kosmetik di Era Digital	522192	7.200.000	7.000.000	97%
4121.BIA. 001 Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi	A Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir	522192	8.700.000	8.700.000	100%
4128.PCA,001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	056 Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	J Percepatan Penanganan Covid-19	522192	84.370.000	6.675.000	8%
4128.PCA,001 Keputusan Registrasi Obat Tradisional dan suplemen kesehatan serta notifikasi kosmetika yang Diselesaikan sesuai standar	058 Penilaian Uji Pratinik / Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	G Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Percepatan Uji Pratinik/Klinik Obat	522192	196.000.000	28.000.000	14%

4129.AFA,001 Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	B Penanganan Pandemi Covid-19	522192	5.632.000	5.632.000	100%
6385.BDD,001 Komunitas masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OT, SK dan Kos	051 Bimbingan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Obat Tradisional,	I Kampanye Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik melalui Lomba TikTok Nasional	522192	2.250.000	-	0%
6385.QDG. 001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	A Perencanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	522192	6.760.000	6.760.000	100%
6385.QDG. 001 UMKM OT yang sesuai Standar	051 Pendampingan UMKM OT	S Penanganan Pandemi Covid-19 Di Direktorat PMPU OT, SK, Kos	522192	7.800.000	2.848.000	37%
Total 522192				172.401.000	95.107.489	55%
Total Pagu dan Realisasi Akun Covid - 19				1.165.285.000	550.938.643	47.28

Belanja Modal

*Belanja Modal
Rp1.724.157.001,00*

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.724.157.001,00 dan Rp412.665.500,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 30 Juni 2022 mengalami kenaikan sebesar 317 persen dibandingkan 2021. Rincian Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

*Tabel 22. Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.478.042.001	322.665.500	358,07
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	90.000.000	100,00
Belanja Modal Lainnya	116.115.000		100,00
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	130.000.000		100,00
Jumlah Belanja Kotor	1.724.157.001	412.665.500	317,81
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	1.724.157.001	412.665.500	317,81

Belanja B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

a

Modal
Peralat
an dan
Mesin

Rp1.478.
042.001,
00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.478.042.001,00 dan Rp322.665.500,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan sebesar 358.07 persen bila dibandingkan dengan realisasi 2020. Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut

Tabel 23. Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Alat Angkutan	0	0	-
Alat Kantor dan Rumah tangga	34.348.050	132.442.000	-
Alat Studio dan Komunikasi dan Pemancar	58.988.901	19.237.500	-
Komputer Unit dan Peralatan Komputer	1.384.705.050	170.986.000	-
Jumlah Belanja Kotor	1.478.042.001	322.665.500	358%
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	1.478.042.001	322.665.500	358,07

Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa :

Tabel 23. Rincian belanja Modal Peralatan dan Mesin

URAIAN	Kuantitas	Nilai
Rak Besi	5	8.724.050
Rak Kayu	10	23.425.000
Dispenser	1	2.199.000
Audio Video Selector (Peralatan Studio)	1	5.138.901
Video Conference	2	30.100.000
Camera Conference	1	23.750.000
PC Workstation	8	100.000.000
Laptop	74	1.174.984.050
Tablet PC	7	52.182.000
Hard Disk	1	2.029.000
Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	46.680.000
Komputer)	1	8.830.000
Jumlah Belanja	121	1.478.042.001

B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Belanja
Modal
Lainnya

Rp116.11
5.000,00

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp116.115.000,00 dan Rp0,00. Belanja Modal Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp116.115.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2021. Belanja Modal Lainnya berupa:

Tabel 24. Rincian Belanja Modal Lainnya

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Aplikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (NUP. 98)	1	67.615.000
2	Aplikasi Sistem Informasi Pemohonan Kajian (SIPK) (NUP.97)	1	48.500.000
Jumlah Belanja		2	116.115.000

B.5.3 Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya

Belanja
Penambahan
Nilai
Aset

Realisasi Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya 30 Juni 2022 dan 2021 adalah

Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya Rp130.000.000,00 masing-masing sebesar Rp130.000.000,00 dan Rp0,00. Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp130.000.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi 2021. Kenaikan ini berupa:

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Pengembangan Aplikasi E-Reporting Efek Samping OT dan SK NUP 83	1	85.000.000
2	Pengembangan Aplikasi E-Reporting Efek Samping OT dan SK NUP 55	1	45.000.000
Jumlah Belanja		2	130.000.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp500.000.000,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar

Rp500.000.000,00 dan Rp0. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Tabel 24. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2022 dan 2021

Jenis	30-Jun-22	31-Dec-21
Uang Tunai	-	-
Kas di Rekening Mandiri No. Rekening : 123-00-0467849-8 BPG175.Deputi II Badan POM RI	683.566.838	-
Kuitansi yang belum di SPM GU	604.579.584	-
Uang Muka Kegiatan (Kas pada BPP)	-	-
BP LS Bendahara	-	-
Jumlah	1.288.146.422	-

C.2 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

*Kas Lainnya di
Bendahara
Pengeluaran
Rp70.243.099,00*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TUP per tanggal 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp70.243.099,00 dan Rp0.

C.3 Persediaan

*Persediaan
Rp0,00*

Nilai Persediaan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp10.025.000,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. dan/atau untuk dijual. dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 dan TA 2021 adalah sebagai berikut :

*Tabel 25. Rincian Persediaan
per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021*

Jenis	30-Jun-22	31-Dec-21
Barang Konsumsi	-	10.025.000
Jumlah	-	10.025.000

Pada Periode Semester I TA 2022 tidak terdapat realisasi Persediaan

Peralatan dan

Mesin

Rp15.471.772.199,00

C.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah Rp15.471.772.199,00 dan Rp14.907.256.361,00. Rincian Mutasi nilai Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir sampai dengan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 27. Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	14.907.256.361
Mutasi tambah:	1.478.042.001
Pembelian	1.478.042.001
Mutasi kurang:	913.526.163
Penghentian Aset dari Penggunaan	913.526.163
Saldo per 31 Desember 2021	15.471.772.199
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2021	(9.866.304.194)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	5.605.468.005

Mutasi tambah peralatan dan mesin sebesar Rp1.478.042.001,00. berupa:

- Pembelian senilai Rp1.478.042.001,00 berupa :

Tabel 27. Pembelian Peralatan dan Mesin

No	URAIAN	Kuantitas	Nilai
1	Rak Besi	5	8.724.050
2	Rak Kayu	10	23.425.000
3	Dispenser	1	2.199.000
4	(Peralatan Studio)	1	5.138.901
5	Video Conference	2	30.100.000
6	Camera Conference	1	23.750.000
7	PC Workstation	8	100.000.000
8	Laptop	74	1.174.984.050
9	Tablet PC	7	52.182.000
10	Hard Disk	1	2.029.000
11	Printer (Peralatan Personal Komputer)	10	46.680.000
12	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	8.830.000
Jumlah Belanja		121	1.478.042.001

- Penghentian Aset dari Penggunaan senilai Rp913.526.163,00 berdasarkan surat Penghentian Aset dari Penggunaan Pada Satker Deputy II No

PL.03.09.43.432.08.21.1542 tanggal 20 Agustus 2021
(terlampir)

Aset Tetap

Lainnya

Rp0,00

C.3 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp00,00 (*nol rupiah*) dan Rp32.450.000,00 (*tiga puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*) Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	32.450.000
Mutasi tambah:	-
Mutasi kurang:	32.450.000
Penghentian Aset Dari Penggunaan	32.450.000
Saldo per 30 Juni 2022	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2022	-
Nilai Buku per 30 Juni 2022	-

Tidak ada mutasi tambah diperiode ini, tetapi terdapat Mutasi kurang atas saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa penghentian aset dari penggunaan pada 30 Juni 2022 Rp32.450.000,00

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Lainnya

Rp424.498.150,00

C.4 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2021 adalah Rp424.498.150,00 dan Rp563.085.650,00. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian, monografi, buku, pustaka, *mikrofisch* dan audio visual lainnya. Mutasi transaksi aset tetap lainnya pada 30 Juni 2022. Rincian

Mutasi Aset Tetap Lainnya periode pelaporan 30 Juni 2022 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 31. Mutasi Aset Tetap Lainnya

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	425.198.150
Mutasi tambah:	0
Reklasifikasi masuk	0
Mutasi kurang:	700.000
Penghentian Aset	700.000
Saldo per 30 September 2021	424.498.150
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku per 30 September 2021	424.498.150

Terdapat mutasi kurang yaitu berupa penghentian asset dari penggunaan senilai Rp137.887.500,00.

C.5 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp9.866.304.194,00)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar (Rp9.866.304.194,00) dan (Rp9.660.563.440,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 32. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 30 Juni 2022

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	15.471.772.199	(9.866.304.194)	5.605.468.005
3	Aset Tetap Lainnya	424.498.150	-	424.498.150
	Akumulasi Penyusutan	15.471.772.199	(9.866.304.194)	6.029.966.155

C.6 Aset Tak Berwujud

*Aset Tak Berwujud
Rp1.784.004.000,00*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah Rp1.784.004.000,00 dan Rp2.065.638.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Terdapat perbedaan nilai pada neraca asset dengan neraca (face) dimana pada neraca asset bernilai Rp1.686.404.000,00. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 33. Mutasi Aset Tak Berwujud

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2021	2.065.638.500
Mutasi tambah:	291.115.000
Pembelian	116.115.000
Pengembangan Nilai Aset	130.000.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	45.000.000
Mutasi kurang:	572.749.500
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	45.000.000
Penghentian dari penggunaan	527.749.500
Saldo per 30 Juni 2022	1.784.004.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2022	(1.416.600.125)
Nilai Buku per 30 Juni 2022	367.403.875

Terdapat Mutasi tambah aset tak berwujud senilai Rp291.115.000,00 Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembelian aplikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) Nup. 98 senilai Rp67.615.000,00 (enam puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu rupiah) dan Pembelian subsite aplikasi sistem informasi permohonan kajian (SIPK) Nup. 97 senilai Rp48.500.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).
2. Pengembangan aplikasi Aplikasi Mobile E-Reporting Efek Samping OT SK Nup. 83 senilai Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan pengembangan aplikasi data base sistem monitoring public warning obat tradisional dan suplemen Kesehatan Nup.55 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)

3. Koreksi pencatatan nilai bertambah aplikasi data base sistem monitoring public warning obat tradisional dan suplemen Kesehatan Nup.55 senilai Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

Terdapat Mutasi kurang Aset Tak Berwujud senilai Rp572.749.500,00 Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Koreksi pencatatan nilai berkurang Aplikasi Mobile E-Reporting Efek Samping OT SK Nup. 83 senilai Rp45.000.000,00
2. Penghentian aset dari penggunaan Rp527.749.500,00

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.437.524.288
,00)*

C.7 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing (Rp2.437.524.288,00) dan (Rp1.681.186.959,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 34. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	1.784.004.000	-1.416.600.125	367.403.875
Aset Lain-Lain	1.044.276.163	-1.020.924.163	23.352.000
Jumlah	2.828.280.163	-2.437.524.288	390.755.875

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi

*Utang Kepada Pihak
Ketiga
Rp1.288.146.422,00*

C.8 Utang Kepada Pihak Ketiga I

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp977.540.276,00 dan Rp0,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Satker Deputy II, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari Belanja yang dibayarkan melalui metode langsung (LS) yang belum terbit SP2D. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga :

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 2021
Belanja barang yang masih harus dibayar	907.297.177	0
Pengeluaran transito yang masih harus dibayar	387.448.019	0
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	317.204.920	0
Jumlah	977.540.276	0

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp49.951.000,00

C.9 Utang yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp49.951.000,00 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas Perintah Bayar UP/TUP yang belum diproses Surat Perintah Pembayaran. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 2021
SPP UP/TUP	18.950.211.867	0
Perintah Bayar UP/TUP	19.000.162.867	0
Jumlah	49.951.000	0

Uang Muka dari KPPN
Rp1.288.146.422,00

C.10 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp1.288.146.422,00 dan Rp0,00 Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Adapun rincian Uang Muka dari KPPN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi 30 Juni 2022	Realisasi 2021
Kas di Bendahara Pengeluaran	500.000.000	0
Kas di Bendahara Pengeluaran TIP	788.146.422	0
Jumlah	1.288.146.422	0

Ekuitas
Rp5.463.473.853,00

C.11 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.463.473.853,00 dan Rp6.098.817.612,00 . Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNPB
Rp60.660.837.500

Jumlah Pendapat untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebesar Rp60.660.837.500,00 dan Rp0,00

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
30 Juni 2022 dan 2020

URAIAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Lainnya	60.660.837.500	0	100%
Jumlah	60.660.837.500	0	100%

Beban Persediaan
Rp10.025.000,00

D.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp10.025.000,00 dan Rp139.974.459,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2022 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 35. Rincian Beban Persediaan

30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	10.025.000	139.974.459	-92,84
Jumlah	10.025.000	139.974.459	-92,84

Beban Barang dan
Jasa
Rp8.435.334.500,00

D.2 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp8.435.334.500,00 dan Rp5.365.042,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa
30 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	816.484.114	227.175.923	259,41
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	84.369.200	38.348.600	120,01
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	20.160.555	27.361.000	(26,32)
Beban Honor Operasional Satker	30.500.000	19.980.000	52,65
Beban Barang Operasional Lainnya	69.339.700	45.900.000	51,07
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	483.478.029	262.872.772	83,92
Beban Bahan	2.296.632.114	1.426.371.494	61,01
Beban Honor Output Kegiatan	154.350.000	75.250.000	105,12
Beban Barang Non Operasional Lainnya	151.145.540	56.280.000	168,56
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19		0	#DIV/0!
Beban Sewa	333.850.866	236.567.500	41,12
Beban Jasa Profesi	1.288.687.840	902.250.000	42,83
Beban Jasa Lainnya	2.611.229.053	1.994.706.339	30,91
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	95.107.489	51.979.000	82,97
Jumlah	8.435.334.500	5.365.042.628	57,23

Tabel 37 Beban Penanganan Pandemi Covid – 19

No	Akun	Nama Barang	Nilai	Total
1	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	Rp	262.872.772
		Masker	Rp 39.617.000	
		Teleconference	Rp 16.172.373	
		Biaya Karantina Mandiri	Rp 5.390.311	
		Paket Data Pegawai	Rp 171.829.936	
		Alat Pelindung Diri	Rp 29.863.152	
2	522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	Rp	51.979.000
		Honor Narasumber pada kegiatan Web Seminar	Rp 51.979.000	
Total Realisasi				314.851.772,00

Beban
Pemeliharaan
Rp8.051.800,00

D.3 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp8.051.800,00 dan Rp7.660.800,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Beban Pemeliharaan

URAIAN JENIS BEBAN	SI TA 2022	SI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.051.800	7.660.800	5,10
Jumlah	8.051.800	7.660.800	5,10

Beban Perjalanan
Dinas
Rp11.371.754.218,00

D.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp11.371.754.218,00 dan Rp8.494.762.648,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk

perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas. fungsi. dan pengawasan. Rincian Beban Perjalanan Dinas periode sampai dengan 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

*Tabel 39. Rincian Beban Perjalanan Dinas
30 Juni 2022 dan 2021*

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-22	30-Jun-21	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	3.440.861.208	1.761.926.665	95,29
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	71.509.000	40.113.000	78,27
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	954.406.900	1.699.041.000	-43,83
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	6.696.871.049		
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	224.000.560	4.993.681.983	-95,51
Total Beban Perjalanan Dinas	11.387.648.717		
Pengembalian	15.894.499		
Jumlah	11.371.754.218	8.494.762.648	33,87

Terdapat kenaikan beban Perjalanan Dinas yang signifikan sebesar 33,87 persen dikarenakan adanya kegiatan Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) dibidang Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

D.5 Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp1.347.227.583,00*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp1.347.227.583,00 dan Rp875.052.538,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 40. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	SI TA 2021	SI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.099.782.300	682.904.747	61,04
Jumlah Penyusutan	1.099.782.300	682.904.747	61,04
Beban Amortisasi Software	218.162.666	190.957.041	-
Beban Penyusutan aset lain-lain	29.282.617	1.190.750	2.359,17
Jumlah Amortisasi	247.445.283	192.147.791	28,78
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.347.227.583	875.052.538	53,96

D.6 Kegiatan Non Operasional

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional

Rp0,00

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional
30 Juni 2022 dan 2021

URAIAN	SI TA 2022	SI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4.620.280	-100,00%
Penerimaan Kembali Belanja barang TAYL		4.620.280	100,00%
Pendapatan Penyesuaian Nilai persediaan	0		#DIV/0!
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan			
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	4.620.280	-100,00%
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	4.620.280	-100,00%

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp6.098.817.612,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp6.098.817.612,00 dan Rp4.548.131.244,00

Defisit LO

Rp39.621.544.399,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp39.621.544.399,00 dan Rp(14.877.872.793,00) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional. surplus/defisit kegiatan non operasional. dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,00

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,00

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Nilai Koreksi Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi Atas

Reklasifikasi

Rp0,00

E.3.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Nilai Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan

Rp0,00. Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap*

Rp0,00

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Nilai Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi*

(Rp45.000.000,00)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp45.000.000,00) dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-
Lain*

(Rp7.419.637.500)

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2022 dan 2021 adalah sebesar (Rp7.419.637.500) dan Rp0,00. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara. antara lain koreksi atas pendapatan. koreksi atas beban. koreksi atas hibah. piutang dan utang.

*Transaksi Antar
Entitas*

*(Rp32.659.150.658,00
)*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 2022 dan 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp32.659.150.658,00) dan Rp14.470.753.274,00 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL. antar KL. antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 43 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	20.582.049.342
Diterima dari Entitas Lain	(53.241.200.000)
Jumlah	(32.659.150.658)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2022. DDEL sebesar Rp53.241.200.000 sedangkan DKEL sebesar Rp20.582.049.342

Tabel 44 Rincian Nilai Transaksi Diterima Dari Entitas Lain

No	Akun	Uraian	Realisasi
1	425321	Pendapatan jasa Pengawasan Obat dan Makanan	53.241.200.000

Ekuitas Akhir

Rp5.463.473.853,00

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2022 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp5.463.473.853,00 dan Rp4.141.011.725,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 PENGUNGKAPAN LAIN - LAIN

F.1.1 Pengelola Keuangan

Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik no. HK.02.02.43.04.21.687 tanggal 12 April 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik HK:02.02.01.21.01 tentang Penetapan Pengelola Keuangan Pada Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen. Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM. dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik telah dilakukan penunjukkan Pejabat Pengelola Keuangan sebagai berikut:

No	Jabatan	Semula	Menjadi
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Drs. M. Suhendri. Apt. M.Farm	Drh. Rachmi Setyorini. MKM
2	Pejabat Pembuat Komitmen I	Anita Kembaren. S.Si. Apt	Meyla Nurwitasari. ST
3	Pejabat Pembuat Komitmen II	Drs. Arustiyono. Apt. MPH	Drs. Arustiyono. Apt. MPH
4	Pejabat Pembuat Komitmen III	Meiske Lucie Tumbol. S.Si. Apt	Faried Rahendra. SP
5	Pejabat Pembuat Komitmen IV	Dra. Isnaeni. Apt (M.epid)	Dra. Isnaeni. Apt (M.epid)

6	Pejabat Pembuat Komitmen V	-	Pulan Widyanati. S.Si. Apt..M.Si
7	Pejabat Penandatanganan SPM	Wijiasih. SF. Apt.. M.Si	Aprizal. S.Kom
8	Bendahara Pengeluaran	Sarmauli	Yenny Komalasari, SE

Lampiran I: Rincian Akumulasi Penyusutan

Satuan Kerja Deputy Bidang Pengawasan Obat Tradisional. Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Rincian Nilai Perolehan. Beban Penyusutan.

**Akumulasi Penyusutan dan Nilai Buku Aset Tetap
Untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2022**

* Beban Amortisasi

No	Aset Tetap	Masa	Nilai Perolehan	Akm. Peny.	Nilai Buku
		Manfaat		Per 31-06-2022	Per 31-06-2022
A	Peralatan dan Mesin				
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	2.654.874.295	1.843.712.593	811.161.702
2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	7	4.386.000	4.386.000	-
3	Alat Pengolahan	5			-
4	Alat Kantor	5	1.539.840.346	940.177.636	599.662.710
5	Alat Rumah Tangga	5	2.366.788.443	1.287.648.981	1.079.139.462
6	Alat Studio	5	295.378.133	165.758.472	129.619.661
7	Alat Komunikasi	5	36.241.123	20.426.548	15.814.575
9	Alat Laboratorium	1	1.950.000	365.625	1.584.375
10	Alat Khusus Kepolisian	5	87.599.117	87.599.117	-
11	Komputer Unit	4	7.221.091.471	4.487.143.779	2.733.947.692
12	Peralatan Komputer	4	1.263.623.271	1.029.085.443	234.537.828
	Jumlah		15.471.772.199	9.866.304.194	5.605.468.005
B	Jaringan				
1	Instalasi Lain	20	0	-	-
	Jumlah		0	-	-
C	Aset Tetap Lainnya				
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	20	353.498.650	-	353.498.650
2	Bahan Perpustakaan Terekam Dan Bentuk Mikro	20	70.999.500	-	70.999.500
	Jumlah		424.498.150	-	424.498.150
D	Software Komputer				
1	Aset Tak Berwujud	5	1.686.404.000	1.319.000.125	688.183.342
	Jumlah		1.686.404.000	1.319.000.125	367.403.875
E	Aset Tetap Yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				
	Alat Kantor	5	49.446.299	48.716.299	730.000
	Alat Rumah Tangga	5	198.309.553	198.309.553	0
	Komputer Unit	4	564.882.873	542.960.873	21.922.000
	Peralatan Komputer	4	100.887.438	100.887.438	0
	Instalasi Lain	20	32.450.000	32.450.000	0
	Bahan Perpustakaan Tercetak	20	700.000	-	700.000
E	Aset Tak Berwujud Yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan				
1	Aset Tak Berwujud	1	97.600.000	97.600.000	0
	Jumlah		946.676.163	923.324.163	23.352.000